

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu *Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu*.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 12.600.000,- dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 74.760.000,00. Hal ini disebabkan karena Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan sudah di limpahkan ke Propinsi. Sedang Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp 11.183.945.996,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 12.300.328.115,00 atau mencapai 90,92 %.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 10.868.990.887,10 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 0,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 10.852.447.808,10,- berupa tanah sebesar Rp. 1.169.103.966,98,- peralatan dan mesin sebesar Rp. 11.892.050.811,88,- gedung dan bangunan sebesar Rp. 8.574.827.134,49 jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 3.871.026.891,08,- ,set tetap Lainnya sebesar Rp. 52.864.650,00 dan konstruksi dalam pengejaan sebesar Rp.203.083.628,00
Nilai Kewajiban sebesar Rp. 150.937.225,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 10.718.053.662,10

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.200.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.945.365.973,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 1.943.165.973.00 -

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan,

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERIKANAN

- 2.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perikanan
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN PDS-PDS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Beban
 - 3.1.3 Belanja

3.1.4	Aset
3.1.5	Kewajiban
3.1.6	Ekuitas Dana
3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda
BAB IV	Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan Pemda
BAB V	PENUTUP

B A B II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERIKANAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SELISIH		
			ANGGARAN	REALISASI	PENCAPAIAN
			a	b	c
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	7.288.858.143	6.000.174.718	82,32
1	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.276.834.870	5.291.487.893	84,34
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.475.030	5.188.433.753	103,77
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pemerintahan Tugas ASN	278.248.040	200.173.810,00	72,83
3	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.778.518	313.283.188	137,18
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Kebutuhan Jasa-Jasa Lain/Perawatan Bangunan Kantor	11.575.190	11.531.000,00	99,62
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Pribadi dan Perjalanan Kantor	3.589.450	7.250.000,00	202,21
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.702.440	50.175.290,00	98,96
4	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Fotokopian	31.218.730	30.838.000,00	98,78
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Baku dan Pekerjaan Perawatan/Perbaikan	3.000.000	3.075.000,00	102,50
6	Sub Kegiatan	Pelatihan Karyawan Tetap	3.883.000	3.474.000,00	89,48
7	Sub Kegiatan	Pembelajaran Mata Pelajaran dan Administrasi SMPD	203.545.000	197.929.000,00	97,24
8	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.244.728	227.987.837	85,31
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lain-Lain	120.428.370	86.121.617,00	71,52
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemasangan Umum Kantor	130.835.470	120.873.700,00	92,34
3	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.724.028	388.178.838	90,54
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional/Meja Mojang	374.114.220	317.838.842,00	85,20
2	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Perawatan dan Meja Lainnya	31.000.000	30.000.000,00	96,77
3	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.910.000	40.340.000,00	96,25
	PROGRAM	PROGRAM PENDEKLASIAN SUMBER EKONOMI UNTUK KEDULATAN DAN YEMANDIRIAN PANGAN	827.162.390	679.117.488	82,10
1	Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Ketersediaan Daerah Kabupaten/Kota	827.162.390	679.117.488	82,10
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	100.000.000	150.000.000	150,00
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jenuh	40.000.000	40.000.000	100,00
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Minimal	280.100.000	270.100.000	96,78
4	Sub Kegiatan	Asuransi dan Skenario/ Penyelesaian Infrastruktur Logistik	120.000.000	88.254.700,00	73,55
5	Sub Kegiatan	Pengembangan Rencana dan Peta Jalan Kemandirian Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	20.000.000	24.752.700,00	123,76
	PROGRAM	PEMINDAHAN DIVERSIKASI DAN KEYAHANAN PANGAN MELALUI SARAFAT	268.028.740	287.922.878	107,42
1	Kegiatan	Penyediaan dan Penyisiran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	4.780.000	4.748.000	99,33
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Himpunan Harga Pangan dan Nelayan Bahan Mulaian	1.100.000	1.100.000	100,00
2	Sub Kegiatan	Asuransi, Skenario/ dan penyelesaian masalah pangan pokok dan pangan lainnya	368.000	688.000	187,23
3	Sub Kegiatan	Pengembangan Kolaborasi Usaha Pangan Masyarakat dan Tote Tani Indonesia	3.000.000	2.960.000	98,67
	Kegiatan	Pengadaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	22.562.190	22.288.000	98,77
1	Sub Kegiatan	Kelembagaan dan Skenario/ Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	20.011.140	20.245.000	101,17
2	Sub Kegiatan	Pengadaan Pasokan Cadangan Pangan Lokal	2.551.050	2.043.000	79,99
	Kegiatan	Pelaksanaan Pencapaian Target Kemandirian Pangan Perkapita/Tahun (sesuai dengan angka kebutuhan gizi)	187.724.660	229.890.878	122,43
1	Sub Kegiatan	Pencapaian dan Pencapaian Target Kemandirian Pangan Per Kapita per tahun	1.071.200	1.071.200	100,00
2	Sub Kegiatan	Pengembangan Masyarakat Dalam Pengembangan/Program Kemandirian Pangan Berbasis Komunitas (Desa Lestari)	230.559.300	224.819.125,00	97,55
	PROGRAM	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	42.148.900	39.821.890	94,47
1	Kegiatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Kebutuhan Pangan Keselamatan	14.838.180	15.821.250	106,69
1	Sub Kegiatan	Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Kerentanan dan Kebutuhan Pangan	14.508.130	15.821.250,00	109,08
2	Kegiatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.310.720	24.000.640	87,88
1	Sub Kegiatan	Asuransi dan Skenario/ Pengembangan Kemandirian Pangan Kabupaten/Kota	21.298.340	21.372.340,00	100,83
2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pemetaan, Pengukuran, dan Penyediaan Cadangan pangan pokok Kabupaten Pangan yang Menakupi 20000 1 (Desa) Daerah Kabupaten/Kota	4.012.380	4.228.000,00	105,37

	PROGRAM	PENGAWASAN KEAMANAN PANGKAS	4.897.200	4.897.200	100,00
1	Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	4.897.200	4.897.200	100,00
1	Sub Kegiatan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal/tumbuhan daerah Kab/Kota	4.897.200	4.897.200	100,00
	PROGRAM	PROGRAM PENDELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.247.811.818	2.188.837.842	97,31
1	Kegiatan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.247.811.818	2.188.837.842	97,31
1	Sub Kegiatan	Pengembangan Usaha/kegiatan nelayan kecil	2.234.090.000	2.179.277.300	97,53
2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Festival Perikanan dan Pengembangan Keterampilan Nelayan Kecil	4.081.176	3.267.710,00	80,07
3	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Festival Samudra Perikanan, Samudra Pemandangan, Samudra Usaha	6.736.642	6.351.860,00	94,28
	PROGRAM	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	729.892.100	712.028.848	97,41
1	Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	729.892.100	712.028.848	97,41
1	Sub Kegiatan	Penelitian Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan (sawah tawar) Daerah Kabupaten/Kota	8.113.320	8.077.360	99,45
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (sawah tawar) Kabupaten/Kota	700.888.810	688.158.888	98,19
3	Sub Kegiatan	Pengadaan Kebutuhan Non dari Lingkungan Budidaya Ikan (sawah tawar) Kabupaten/Kota	4.538.790	4.512.760	99,43
	PROGRAM	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMESARAN HASIL PERIKANAN	186.177.878	181.844.778	97,14
1	Kegiatan	Pencertihan Trade Dress Usaha, Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	7.888.808	7.881.808	99,90
1	Sub Kegiatan	Penyediaan data dan informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan	1.000.000	7.881.808	99,90
2	Kegiatan	Pemeriksaan mutu dan keamanan Hasil Perikanan yang telah diproses dan/atau dipasarkan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	6.842.860	6.868.000	100,37
1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Bimbingan dan Peningkatan Fasilitas atau sarana pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	5.943.800	5.323.800	89,42
3	Kegiatan	Penyediaan dan Pemasaran Sertifikat Standar Industri Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91.988.200	89.199.000	96,88
1	Sub Kegiatan	Pemeriksaan Fasilitas bagi Petaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91.988.200	89.199.000,00	96,88
		TOTAL	12.100.328.118	11.183.945.996	92,37

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal Pencapaian Target kinerja ini memiliki hambatan dan kendala-kendala, yang diuraikan per kegiatan dibawah ini :

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 8 Program, 16 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.300.328.115,- dan Realisasi sebesar Rp. 11.183.945.996 (90,92 %).

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi keuangan pada Dinas Perikanan dan Pangan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 6.275.824.970,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.393.607.563,-. Pada kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 6.059.475.030,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.188.433.753,- (85,63 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sasaran sub kegiatan ini adalah tertib administrasi pelaksanaan tugas ASN selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 216.349.940,- dengan realisasi sebesar Rp. 205.173.810,- (94,83 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Perikanan dan Pangan. Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 325.719.516,- dengan realisasi anggaran Rp. 313.293.180,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.575.190,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.531.000,- (99,62%) , hambatan dan kendala tidak ada.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor , yaitu 1 (satu) unit Printer A3 Epson I1300 dengan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.9.665.656,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.250.000,- (75,01 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Alat Tulis Kantor dan Logistik lainnya selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.252.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.275.280,- atau 96,22 % , hambatan dan kendala tidak ada.

4. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan:**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan, Pagu Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 31.218.730,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.838.000,- (98,78 %) , hambatan dan kendala tidak ada.
5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.975.000,- (77,50 %) , hambatan dan kendala tidak ada.
6. **Fasilitas Kunjungan Tamu**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Makanan dan Minuman untuk tamu dari pusat maupun dari Propinsi selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.662.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.494.050,- (98,06 %) , hambatan dan kendala tidak ada.
7. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sasaran sub kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan, Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 103.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.929.850,- (97,34 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah seperti Listrik, Air dan Jasa Pelayanan Umum Kantor.Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 257.244.728,- dengan realisasi anggaran Rp. 207.097.337,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 120.409.278,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.121.617,- (71,52 %) , hambatan dan kendala tidak ada.
2. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 136.835.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.975.720,- (88,41 %) , hambatan dan kendala tidak ada.

IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan dari Kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perikanan dan Pangan selama 12 bulan sehingga memiliki umur ekonomis diatas rata-rata. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 426.724.029,- dengan realisasi anggaran Rp. 389.176.638,- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan dan Pangan, Pagu anggaran Sub Kegiatan ini Rp. 354.144.029,- dengan realisasi anggaran Rp. 317.835.638,- atau (89,76 %) hambatan dan kendala tidak ada.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 31.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.601.000,- atau 98,71 % hambatan dan kendala tidak ada.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan agar menambah nilai aset bangunan dan terpeliharanya gedung kantor Dinas Perikanan yaitu berupa rehab Kantor, Pagu anggaran sub Kegiatan ini Rp. 41.610.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 40.740.000,- atau 97,91 %, hambatan dan kendala tidak ada.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan informasi pengelolaan potensi perikanan tangkap yang ada di Pesisir Selatan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan. Untuk mencapai tujuan program tersebut, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.247.811.816,- dengan realisasi Rp. 3.186.527.942 dan didukung 1 kegiatan berikut ini:

I. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarna yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan. Pagu Anggaran untuk

kegiatan ini sebesar Rp. 3.247.811.816,- dengan realisasi Rp. 3.186.527.942 dan didukung 3 Sub kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Sub Kegiatan ini bertujuan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bersumber dari Dana DAK, Pusat dan Propinsi. Pagu anggaran sub Kegiatan ini Rp. 3.234.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.173.572.692,- atau 98,13 %, hambatan dan kendala tidak ada.

2. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membantu kelembagaan KUB yang berbadan hukum. Pagu Anggaran Sub kegiatan setelah Refocusing sebesar Rp. 4.081.136,- dan terealisasi sebesar Rp.3.267.750,- atau 80,07 %. Hambatan dan kendala yang dihadapi adalah target kinerja dari sub kegiatan ini tidak tercapai karena adanya pengurangan anggaran (Refocusing)

3. Pelaksanaan Fasilitas Bantuanan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk kelompok KUB dalam pendanaan (modal) dan kemitraan usaha. Pagu Anggaran Sub kegiatan setelah Refocusing sebesar Rp. 9.730.680,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.687.500,- atau 99,56 %. Hambatan dan kendala yang dihadapi adalah target kinerja dari sub kegiatan ini tidak tercapai karena adanya pengurangan anggaran (Refocusing)

C. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya baik diperaliran umum atau kolam. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 723.502.120,- dengan realisasi anggaran Rp. 712.029.645,- yang terdiri dari 1 kegiatan dan Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai data pembudidayaan ikan sehingga data yang diperoleh lebih valid dan akurat. Pagu Anggaran sub kegiatan ini setelah refocusing sebesar Rp. 9.115.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.977.960,- atau 98,46 %. Hambatan dan kendala yang dihadapi adalah target kinerja dari sub kegiatan ini tidak tercapai karena adanya pengurangan anggaran (Refocusing)

2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya , Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 709.855.810,- dengan realisasi anggaran Rp. 698.538.895,- atau 98,41 %, hambatan dan kendala tidak ada.
3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui penyakit ikan secara dini sehingga dapat diobati secara cepat , Pagu Anggaran sub kegiatan ini setelah refocusing sebesar Rp. 4.530.790,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.512.790,- atau 99,60 %. Hambatan dan kendala yang dihadapi adalah target kinerja dari sub kegiatan ini tidak tercapai karena adanya pengurangan anggaran (Refocusing)

D. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program ini bertujuan untuk peningkatan produk perikanan yang berdaya saing dengan cara meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan meningkatnya nilai konsumsi ikan. Pagu anggaran program ini Rp. 105.177.976,- dengan realisasi anggaran Rp. 101.644.776,-. Program ini didukung dengan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
 1. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran hasil
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai data Pengolahan hasil perikanan sehingga data yang diperoleh lebih valid dan akurat. Pagu Anggaran sub kegiatan ini setelah refocusing sebesar Rp. 7.966.926,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.891.926,- atau 99,06 %. Hambatan dan kendala yang dihadapi adalah target kinerja dari sub kegiatan ini tidak tercapai karena adanya pengurangan anggaran (Refocusing)
- II. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- III. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

2. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gemar makan ikan yang dimulai dari masa ibu hamil (Bayi dalam Kandungan). Mengingat ikan memiliki komposisi nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan, kecerdasan dan pertumbuhan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya, pengolahah dan pemasaran hasil perikanan melalui peningkatan rata-rata konsumsi ikan.

Pagu Anggaran setelah refocusing sebesar Rp.91.568.200,- dan terealisasi sebesar Rp.88.199.000,- kegiatan ini tidak bisa terlaksanan karena terjadinya wabah virus Corona (Covid 19) sehingga mengakibatkan perekonomian masyarakat terganggu dan untuk membantu masyarakat maka anggaran di kurangi di masing-masing OPD

E. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan, sehingga cukup memenuhi kebutuhan pangan.

Pagu Anggaran program ini tahun 2021 sebesar Rp. 656.525.740,- dengan realisasi sebesar Rp. 607.221.000,-

F. Program Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program ini bertujuan untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pagu Anggaran untuk program ini tahun 2021 sebesar Rp. 281.797.130,- dan Realisasi sebesar Rp.273.347.915,-

BAB. III.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos –Pos Pelaporan Keuangan Pemda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan yang dibuat adalah berbasis akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik.

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 terdiri dari:

3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

3.1.2. Beban

Beban merupakan suatu penurunan nilai ekonomi yang berupa kas keluar atau aktiva berkurang. Biasanya beban dianggap sebagai kewajiban yang dapat menyebabkan nilai ekuitas menurun. Umumnya beban dianggap sebagai pengorbanan atau kewajiban yang sebelumnya telah terjadi.

Beban adalah suatu yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan tujuan untuk dapat memperoleh pendapatan, misalnya akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti beban listrik, beban penyusutan, beban sewa, beban gaji, dan lain-lain.

Beban dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Beban Perolehan Pendapatan
- b. Beban Operasi/rutin
- c. Beban operasional lainnya
- d. Beban lainnya

3.1.3. Belanja

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja

3.1.4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Dinas Perikanan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

3.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Perikanan Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

a. Ekuitas Dana Lancar

b. Ekuitas Dana Investasi

c. Ekuitas Dana Cadangan

3.2 . Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda

BELANJA

Belanja meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Total Pagu Anggaran Rp. 12.300.328.115,- dan realisasi Belanja Daerah sampai dengan Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	73.089.537,00	11.183.945.996,00
	Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah Sampai dengan Desember 2021 realisasi Belanja Operasi mencapai Rp. 10.917.975.996,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	2.264.477.109,00	3.435.689.080,00
	- Tambahan Penghasilan PNS	981.248.791,00	1.808.744.673,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	00	282.225.000,00
	- Insentif Pemungutan Ret Daerah	00	00
	Jumlah Belanja Pegawai	3.245.725.900,00	5.526.658.753,00
	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Bahan Pakai Habis	143.695.659,00	619.732.800
	- Belanja Bahan/Material	59.952.500,00	00
	- Belanja Jasa Kantor	72.609.203,00	477.727.817,00
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	203.171.281,00	00
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	51.433.450,00	00
	- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	24.500.200,00	4.000.000,00
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	00
	- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	00	00
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	00	49.000.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman	24.652.500,00	00
	- Belanja Pakaian Kerja	00	00
	- Belanja Perjalanan Dinas	170.424.944,00	428.422.927,00
	- Belanja Pemeliharaan	57.349.700,00	376.577.999,00
	- Belanja Jasa Konsultasi	27.956.000,00	00
	- Belanja Hibah Barang/Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	2.938.902.650,00	2.938.902.650,00
	- Belanja Honorarium Non Pegawai	250.000,00	00

- Honorarium PNS	143.399.000,00	,00
- Honorarium Non PNS	247.000.000,00	,00
- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	00	549.760.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	4.127.363.637,00	2.505.271.543,00

Belanja Hibah

- Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum	00	2.886.046.700,00
Jumlah Belanja Hibah	00	2.886.046.700,00

ii) Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Alat dan Mesin	203.980.000,00	173.618.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	00	92.351.000,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	91.431.750,00	,00
Jumlah Modal	295.411.750,00	265.969.000,00

ASET

Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	00,-	,00

Saldo kas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.00,-

Untuk Tahun 2021 Saldo Kas Dinas Perikanan dan Pangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 00,-

Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Aset Tetap	0	10.647.969.087,16

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.647.969.087,16, terjadi mutasi tambah sebesar Rp.1.846.946.963,55 dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 2.007.499.701,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	0	1.084.196.500,49
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.084.196.500,49 terjadi mutasi Kurang sebesar Rp.43.925.983,00 dan Mutasi tambah sebesar Rp. 2.944.500,00.		
2. Peralatan Dan Mesin	0	11.249.376.404,68
Dalam tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 269.341.324,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 912.015731,00.		
3. Gedung dan bangunan	0	9.756.564.850,49
Dalam tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 2.156.011.699,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 974.273.983,00.		
4. Jalan Irigasi dan Jaringan	0	3.978.153.887,05
Dalam tahun 2021 terdapat mutasi tambah sebesar Rp.184.411.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp.77.284.004,00		
5. Aset Tetap Lainnya	0	52.864.650,00
Dalam tahun 2021 tidak terjadi mutasi tambah maupun kurang		
6. Kontruksi Dalam Pengerjaan		203.083.628,00
6. Akumulasi Penyusutan		(15.676.270.833,55)
Dalam tahun 2021 terjadi mutasi Tambah sebesar Rp. (765.761.559,45)		
2. Aset Lainnya	0	16.543.079,00
Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 16.543.079,00 tidak terjadi mutasi.		
c Kewajiban		
Komposisi dan nilai saldo Kewajiban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 0,- terjadi mutasi kurang sebesar Rp. 150.937.225,00		
d Ekuitas		
Komposisi dan nilai saldo Ekuitas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 11.287.463.771,16,- terjadi Mutasi Tambah sebesar Rp. 2.469.898.568,55 dan mutasi kurang sebesar Rp. 2.860.618.226,00		

BAB VI
PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan, Januari 2022

